



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika disingkat Dinkominfo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dan Dinkominfo berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didasarkan pada Perencanaan Stratejik tahun 2022 telah menetapkan 3 sasaran dengan 5 program dan 12 kegiatan. Untuk mencapai sasaran dan program, serta kegiatan yang telah ditetapkan, memperoleh anggaran APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 13.335.578.000,00. Berdasarkan hasil perhitungan pada pengukuran kinerja tahun 2022, dan evaluasi kinerja, telah tercapai rata rata capaian kinerja sebesar 93,94 %. Sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp. 12.856.393.110,00 (93,94 %).

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan, diperlukan perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang efektif dan efisien serta evaluasi secara komprehensif, guna mengatasi hambatan/permasalahan yang ada atau mungkin timbul di masa mendatang.



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum SKPD	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	18
1.3. Susunan Organisasi Diskominfo Kota Pekalongan.....	19
1.4. Isu Strategis Yang Dihadapi SKPD	22
1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1. Rencana Strategis.....	25
2.2. Perjanjian Kinerja	31
2.3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	46
2.4. Indikator Kinerja Utama	47
2.5. Rencana Kinerja Tahunan 2022	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	51
3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	51
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	53
3.3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	57
3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN	68
3.5. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	71
BAB IV P E N U T U P.....	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Peningkatan dan Perbaikan Kinerja.....	72
4.3. Penutup.....	72



DAFTAR TABEL

tabel 1.1_daftar OPD yang terhubung dengan batik.net	6
tabel 1.2_Daftar Layanan yang terimplementasi secara elektronik.....	7
tabel 1.3_Komposisi SDM Dinkominfo Kota Pekalongan Berdasarkan Status Kepegawaian.....	15
Tabel 2.1_Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan Periode 2021-2026	29
Tabel 2.2_Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2026..	30
Tabel 2.3_Perjanjian Kinerja Tahun 2022	32
Tabel 2.4_Rencana Anggaran Tahun 2022.....	33
Tabel 2.5_FORMULIR RENCANA AKSI_PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	34
Tabel 2.6_Indikator Kinerja UtamaDinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan	48
Tabel 2.7_Rencana Kinerja th. 2022.....	49
Tabel 3.1_Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah.....	52
Tabel 3.2_Pengukuran dengan Skala Ordinal	52
Tabel 3.3_Target Capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2022.....	54
Tabel 3.4_Indikator Kinerja Utama Dinkominfo Kota Pekalongan	55
Tabel 3.5_Perbandingan antara Target dan Realisasi kinerja tahun 2022	58
Tabel 3.6_Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2022 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	59
Tabel 3.7_Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	60
Tabel 3.8_Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	61
Tabel 3.9_Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	62
Tabel 3.10_Pagu dan Realisasi Anggaran_Dinkominfo Kota Pekalongan_Tahun 2022.....	69
Tabel 3.11_Pencapaian Pagu dan Realisasi Anggaran Dinkominfo Kota Pekalongan Berdasarkan Program Tahun 2022	70
Tabel .3.12_Capaian Prestasi yang diraih Sasaran Dinkominfo Tahun 2022	71



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD

Seiring dengan bergesernya peran negara dan pemerintah dari peranannya sebagai pemerintah (*government*) menjadi pemerintahan (*governance*), transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip-prinsip yang utama untuk dapat dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan paradigma peran pemerintahan (*governance*) yang senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik serta melibatkan masyarakat dalam seluruh kegiatan pembangunannya.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas mengandung makna bahwa segala bentuk dan hasil akhir pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku *stakeholder* utama, pengguna layanan, dan pemegang kedaulatan tertinggi negara. Bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah tersebut disusun dalam suatu sistem yang terintegrasi, yang disebut sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP berkomitmen bahwa sejak tahap penyusunan Perjanjian Kinerja hingga tahap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada akhir tahun anggaran, senantiasa ter-*publish* kepada masyarakat. Masyarakat dalam hal ini dilibatkan secara penuh untuk dapat melakukan pengawasan terhadap ketercapaian target masing-masing Perangkat Daerah dalam periode anggaran tertentu.

LKJIP sendiri disusun dengan tujuan menyajikan informasi kinerja yang terukur kepada Walikota, selaku pemberi mandat dan kepada masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. LKJIP juga sekaligus digunakan sebagai alat evaluasi untuk melakukan upaya-upaya perbaikan bagi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerjanya pada masa-masa mendatang.

Berkaitan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2022 sebagai tahun Perubahan Renstra ketiga bagi Perangkat Daerah, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, berikut akan disajikan secara lengkap LKJIP Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022. Selain sebagai pemenuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, LKJIP ini juga disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota



Pekalongan Nomor 25 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021.

Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) merupakan suatu Perangkat Daerah bentukan baru Dinas Tipe B, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Pada tahun 2022, Dinkominfo memperoleh peringkat 2 “Badan Publik Kategori Informatif Pemerintah Kota Pekalongan”. Pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik juga memperoleh beberapa penghargaan seperti :

- 1) Peringkat 3 Lembaga Penyiaran Terbaik se-jateng oleh KPID Jateng
- 2) Berita Teraktif di Layanan Informasi Publik oleh Antara Digital Media
- 3) PPID Informatif oleh Komisi Informasi Jateng
- 4) Peringkat 1 tingkat OPD dan/atau peringkat 5 tingkat OPD dan kelurahan pada survei kepuasan masyarakat (SKM) oleh Bagian Organisasi

Terkait Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), SKM Dinkominfo mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 80,06 menjadi 99,08 pada tahun 2022. Peningkatan dikarenakan pada tahun 2022 Dinkominfo banyak berinovasi untuk menyesuaikan perkembangan terbaru. Beberapa hal untuk menyesuaikan kegiatan tersebut adalah:

1. Mengadakan pelatihan pengelolaan website perangkat daerah
2. Mengadakan pelatihan pengelolaan jaringan untuk OPD
3. Mengadakan Pelatihan Google Tools dan Canva
4. Mengadakan workshop Guru Cakap Membuat Media Pembelajaran Digital
5. Sosialisasi Menjaga Keselamatan Anak di Dunia Maya
6. Pelatihan Pembuatan Video Pembelajaran
7. Mengadakan talkshow pada LPPL Batik TV
8. Mengadakan talkshow pada LPPL RKB



BELANJA OPERASI

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai Rp. 2.981.533.498,00 dan belanja barang jasa sebesar Rp. 8.409.195.801,00. Total belanja modal sebesar Rp. 1.465.663.811,00

BELANJA MODAL

Belanja modal terdiri dari dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.330.616.705,00, untuk belanja modal gedung dan bangunan Rp. 25.697.200,00, belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 109.349.906,00. Total belanja modal sebesar Rp. 1.465.663.811,00.

Total penyerapan anggaran Dinkominfo Kota Pekalongan pada tahun ini mengalami Kenaikan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Total serapan anggaran Dinkominfo tahun anggaran 2022 mencapai angka 93,94 % dan terbagi ke dalam komposisi beberapa jenis belanja yang tergambar dalam grafik sebagai berikut:



Grafik di atas menunjukkan bahwa Belanja Barang dan Jasa beserta Belanja Pegawai terserap dengan persentase lebih tinggi dibandingkan Belanja modal. Hal ini secara luas menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Dinkominfo pada tahun 2022 secara keseluruhan telah berorientasi pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi layanan dan kebutuhan masyarakat.

A. Sarana Prasarana

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan memiliki dukungan sarana dan prasarana yang berperan dan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas fungsi, antara lain:

Gedung Diskominfo berlokasi di Jalan Majapahit Nomor 5 Pekalongan dengan luas 1.524 m² dan luas bangunan gedung 1.347 m², terdiri dari 2 lantai yaitu lantai 1 digunakan untuk ruang perkantoran, ruang kantor bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur dan Statistik, ruang multimedia, ruang pusat data dan jaringan, dan ruang PPID.

Adapun lantai dua digunakan untuk ruang BLC, ruang arsip dan ruang bidang aplikasi dan persandian.

Selain sarana dan prasarana Gedung, Diskominfo juga mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Sejak pada tanggal 12 November 2014 dengan alokasi frekuensi pada kanal 57 UHF, dan LPPL Radio Kota Batik yang berdiri pada



tahun 1975. Selain LPPL Batik TV dan Radio Kota Batik, Dinkominfo juga memiliki layanan Call Center 112 yang didirikan pada tahun 2019. Layanan Pengaduan Kegawatdaruratan Call Center 112 bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat terkait Layanan kegawatdaruratan Call Center 112 ini telah sinergi antara Dinkominfo, BPBD Kota Pekalongan, Satpol PP dan pemadam kebakaran, Dinas Kesehatan, dan PMI kemudian juga kerjasama dengan Polres Pekalongan Kota dan PLN Kota Pekalongan.





B. Data- Data

Adapun data pada Dinkominfo Kota Pekalongan tahun 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Data penanganan pengaduan masyarakat



2. Data Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intranet (Batik.Net)

tabel 1.1

daftar OPD yang terhubung dengan batik.net

No	Nama OPD	Terhubung dengan batik.net
1	Sekretaris DPRD	√
2	Inspektorat	√
3	BKD	√
4	BKPPD	√
5	BAPPEDA	√
6	Dinas Pendidikan	√
7	Dinas Kesehatan	√
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	√
10	Satpol PP	√
11	Dinsos P2KB	√
12	Dinperinaker	√



13	DPMPPA	√
14	Dinperpa	√
15	Dinas Lingkungan Hidup	√
16	Dindukcapil	√
17	Dinas Perhubungan	√
18	Dinkominfo	√
19	Dindagkop UMKM	√
20	DPM PTSP	√
21	Dinparbudpora	√
22	Dinarpus	√
23	DKP	√
24	BPBD	√
25	Kesbangpol	√
26	SEKDA	√
27	Kecamatan Pekalongan Barat	√
28	Kecamatan Pekalongan Timur	√
29	Kecamatan Pekalongan Selatan	√
30	Kecamatan Pekalongan Utara	√

3. daftar layanan yang terimplementasi secara elektronik

tabel 1.2

Daftar Layanan yang terimplementasi secara elektronik

No	Deskripsi Singkat	Alamat URL	Unit Kerja yang mengelola
1	Email / Surat elektronik Pemerintah Kota Pekalongan	https://mail.pekalongankota.go.id/	Dinkominfo
2	Perpustakaan digital	https://digilib.pekalongankota.go.id/utama	Dinarpus
3	Sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan daerah	http://simkeu.pekalongankota.go.id/	BPKAD
4	Sistem aplikasi berbasis komputer meliputi proses perencanaan, pelaksanaan,	https://simwas.pekalongankota.go.id/	Inspektorat



No	Deskripsi Singkat	Alamat URL	Unit Kerja yang mengelola
	pengendalian, pelaporan dan tindak lanjut yang terintegrasi		
5	Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Barang Aset Daerah	https://simbada.pekalongankota.go.id/simbada2018/	BPKAD
6	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Pekalongan	http://simpeg.pekalongankota.go.id/	BKPSDM
7	Sistem Informasi Manajemen Surat Online antar SKPD dan disposisi	https://e-suratonline.pekalongankota.go.id/	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Layanan Pajak dan Retribusi Daerah	http://simpatda.pekalongankota.go.id/	BPKAD
9	Aplikasi Kehadiran Pegawai Non PNS Pemerintah Kota Pekalongan	http://e-presensi.pekalongankota.go.id/	Dinas Komunikasi dan Informatika & BKD
10	Aplikasi Kehadiran Pegawai PNS Pemerintah Kota Pekalongan	http://new-presensi.pekalongankota.go.id/	Dinas Komunikasi dan Informatika & BKPSDM
11	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pelaporan Pindah Datang Luar Kota	http://pindah-luarkota.pekalongankota.go.id/	Dindikcapil
12	Sistem Informasi Manajemen Kliping Online	http://e-kliping.pekalongankota.go.id/	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terintegrasi Kelurahan-Kecamatan	http://simpatik.pekalongankota.go.id/	Kelurahan - Kecamatan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINKOMINFO KOTA PEKALONGAN TH. 2022

No	Deskripsi Singkat	Alamat URL	Unit Kerja yang mengelola
14	SIM Layanan Informasi / Data Publik	http://ppid.pekalongankota.go.id/	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	SIM Layanan Informasi / data Transparansi Anggaran Daerah	http://tpad.pekalongankota.go.id/	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	https://jdih.pekalongankota.go.id/	Bagian Hukum
17	Jurnal Litbang Kota Pekalongan	https://jurnal.pekalongankota.go.id/	BAPPEDA
18	Aplikasi monitoring jaringan BatikNet Pemerintah Kota Pekalongan	https://psii.pekalongankota.go.id/login	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Aplikasi untuk mengelola kegiatan/pelaksanaan tugas pegawai (harian/mingguan/bulanan/tahunan)	kinerja.pekalongankota.go.id	BKPSDM
20	Aplikasi Permohonan Layanan TIK OPD	http://helpdesk.pekalongankota.go.id/	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Aplikasi Pendaftaran Perijinan Kapal Perikanan	http://sipekan.pekalongankota.go.id/	DKP
22	Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kota Pekalongan	https://jarlitbangnov.pekalongankota.go.id/	Bappeda
23	Sistem Pelayanan Kepegawaian Secara Online	http://pamomong.pekalongankota.go.id	BKPSDM
24	Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas & Ekonomis	https://sakpore.pekalongankota.go.id	DPMPSTP



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINKOMINFO KOTA PEKALONGAN TH. 2022

No	Deskripsi Singkat	Alamat URL	Unit Kerja yang mengelola
25	Sistem Informasi Kodifikasi Regulasi Pelayanan Terpadu	https://sikarep.pekalongankota.go.id	DPMPTSP
26	Sistem Aplikasi PPDB Online Kota Pekalongan	ppdb.dindik.pekalongankota.go.id	Dinas Pendidikan
27	APBS Kota Pekalongan	http://e-apbs.dindik.pekalongankota.go.id/	Dinas Pendidikan
28	Aplikasi Monitoring dan Informasi Telecenter yang ada di Kota Pekalongan	https://telecenter.pekalongankota.go.id/	Dinas Komunikasi dan Informatika
29	SMS Gateway Kota Pekalongan	http://sms.pekalongankota.go.id/	Dinas Komunikasi dan Informatika
30	SIM Pemantau KIR dan SIUP Dinas Perhubungan Kota Pekalongan	http://e-perhubungan.pekalongankota.go.id/	DINHUB
31	SIM Dokumentasi Kegiatan Walikota	http://siapkawal.pekalongankota.go.id	Bag Prokompim Setda
32	Pusat Data Terpadu Kota Batik (PUSAKA)	http://pusaka.pekalongankota.go.id/	Dinkominfo
33	Unit lelang pengadaan	https://simpbj.pekalongankota.go.id/	Bagian PBJ dan minbang
34	SIM Kepegawaian	http://e-pegawai.pekalongankota.go.id/	BKPSDM
35	Portal Data Kota Pekalongan	http://data.pekalongankota.go.id/	Bappeda
36	Jaring Pengaman Sosial	http://jps.pekalongankota.go.id	DinsosP2KB



No	Deskripsi Singkat	Alamat URL	Unit Kerja yang mengelola
37	Layanan Informasi Gugus Tugas Penanganan COVID 19	http://corona.pekalongankota.go.id	Gugus Tugas Covid 19
38	Sistem Layanan Pembuatan SPT Pajak Online	espt.pekalongankota.go.id	BPKAD
39	Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	lpse.pekalongankota.go.id	Bag Mimbang Setda
40	Geografis berbasis Spatial		Dinkominfo
41	Sistem Layanan Administrasi Kependudukan di Dindikcapil	e-adminduk.pekalongankota.go.id	Dindikcapil
42	Layanan API DPMPTSP	api-sakpore.pekalongankota.go.id	DPMPTSP
43	Sistem Layanan Pembayaran PBB	pbb.pekalongankota.go.id	BPKAD
44	Sistem Dashboard PAD	pajak.pekalongankota.go.id	BPKAD
45	Sistem Layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	bphbtb.pekalongankota.go.id	BPKAD
46	Data Dapodik	data-dindik.pekalongankota.go.id	Dindik
47	Sistem Evaluasi Pekerjaan	sivape.bappeda.pekalongankota.go.id	Bappeda
48	Aplikasi Smart City berbasis Android		Dinkominfo
49	Virtual Tour Objek Wisata	http://virtualtour.pekalongankota.go.id	Dinparbudpora



No	Deskripsi Singkat	Alamat URL	Unit Kerja yang mengelola
50	Sistem Informasi Belanja Pendapatan dan Akuntansi BLUD RSUD Bendan	sibendanku.pekalongankota.go.id	RSUD Bendan
51	m-Bendan	bemo.rsudbendan.pekalongankota.go.id	RSUD Bendan
52	Sistem Layanan yang tersedia di Pemerintah Kota Pekalongan	layanan.pekalongankota.go.id	Dinkominfo
53	Geographical Information System Information Technology Kota Pekalongan	https://santika.pekalongankota.go.id/	Dinkominfo
54	Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	https://simparta.pekalongankota.go.id/	Dinparbudpora
55	website info pariwisata kota pekalongan	http://infopariwisata.pekalongankota.go.id/	Dinparbudpora

C. Kendaraan Operasional

Mobil sirkel dan mobil M-CAP

Penyebarluasan Informasi melalui mobil siaran keliling (sirkel) untuk melakukan promosi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kota Pekalongan. Armada yang digunakan untuk layanan siaran keliling berjumlah 1 unit.



Penggunaan armada Mobile Community Access Point (MCAP) Tujuan kegiatan ini sebagai penguatan dan pengembangan media center. Berupa, pengenalan (e-literasi) teknologi informasi kepada masyarakat, penyebarluasan dan implementasi aplikasi informatika yang legal serta layanan teknologi dan akses informasi melalui MCAP. Jumlah armada MCAP berjumlah 1 mobil



D. Gedung Call Center 112 Kota Pekalongan.

Gedung call center 112 Kota Pekalongan terletak di kompleks kantor pemerintahan setda Kota Pekalongan Jalan Mataram No.1



Call Center 112 berfungsi untuk melakukan penanganan pengaduan masyarakat Kota Pekalongan, Pengaduan yang ditangani Call Center 112 Kota Pekalongan yakni layanan gawat darurat, layanan gawat tetapi tidak darurat, dan layanan informasi. Layanan gawat darurat antara lain kebakaran, banjir, rob, kecelakaan, serta kebutuhan ambulance dan mobil jenazah. Selanjutnya layanan gawat tidak darurat seperti pohon tumbang, ada anak punk atau hal-hal yang mengganggu lingkungan, penanganan sarang tawon, ada gelandangan, pengemis, pengamen jalanan, perjudian miras, prostitusi, donor darah dan permohonan darah dari masyarakat. Kemudian layanan informasi kaitannya dengan layanan lain yang dilakukan Pemkot Pekalongan, layanan call center 112 beroperasi 24 jam. Cara mendapatkan pelayanan call center 112 cukup menelepon ke nomor 112 dari telepon kabel atau dari telepon seluler (handphone).

Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan kesemuanya berjumlah 118 orang. Bila diklasifikasikan atas dasar kelompok fungsi pada bidang dan sub bidang dimaksudkan akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan. Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berdasarkan fungsi, status kepegawaian dan Golongan/Ruang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

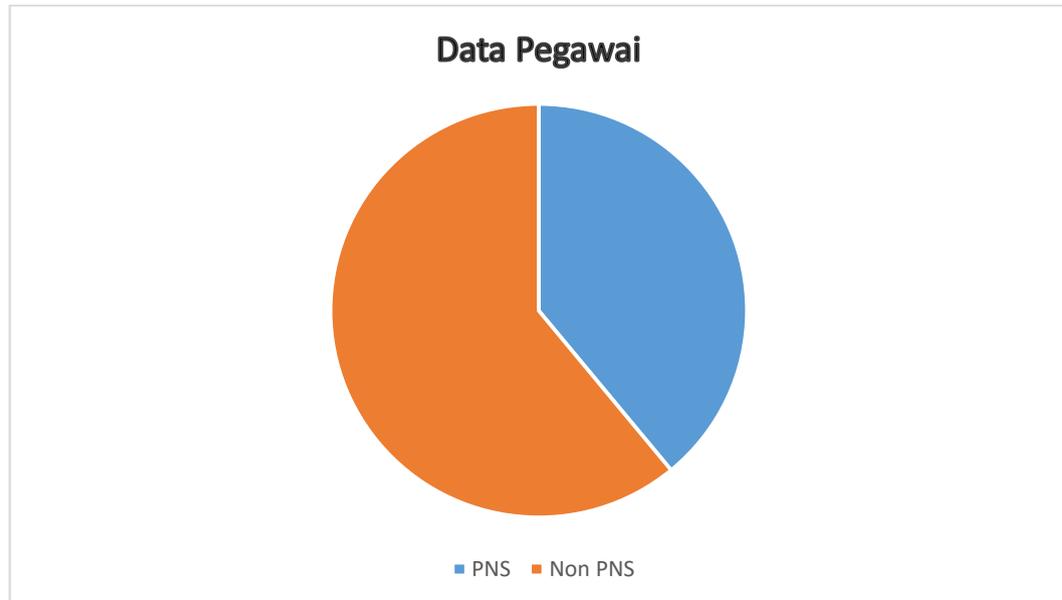


tabel 1.3
Komposisi SDM Dinkominfo Kota Pekalongan Berdasarkan Status
Kepegawaian

STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	PROSENTASE
Pegawai Negeri Sipil		
- Jabatan Struktural	9	7.6 %
- Jabatan Fungsional Pranata Komputer Muda	4	3.3 %
- Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Muda	2	1.6 %
- Jabatan Fungsional Umum	8	6.7 %
- Calon Jabatan Fungsional Statistisi Pertama	1	0.8 %
- Calon Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	1	0.8 %
- Calon Jabatan Fungsional Sandiman Pertama	1	0.8 %
- Calon Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pertama	3	2.5 %
- Calon Jabatan Fungsional Pranata Komputer Terampil	2	1.6 %
NON PNS		
- Tenaga Kontrak	1	0.8 %
- Tenaga Kegiatan Dinas Kominfo	33	27.9 %
- Tenaga Kegiatan LPPL RKB	13	11 %
- Tenaga Kegiatan LPPL Batik TV	40	33.8 %
JUMLAH	118	100 %



Sedangkan berikut ini merupakan komparasi jumlah PNS dan Non PNS pada Dinkominfo Kota Pekalongan, yang mana jumlah Non PNS lebih banyak dibandingkan jumlah keseluruhan PNS-nya: PNS = 31 NON PNS = 87



Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan adalah sesuai dengan Diskominfo Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan yang mengemban amanah sebagai pelaksana **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Adapun Sejarah berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan terurai sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pekalongan adalah salah satu Dinas Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, yang menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika. Secara legal formal, Diskominfo Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Perda Nomor 1 Tahun 2011 ini merupakan revisi atau evaluasi atas berbagai Perda tahun 2008 yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat



Daerah Kota Pekalongan (Perda Nomor 4, 5, 6, 7 dan 8 Tahun 2008).

Sekalipun secara nomenklatur, pembentukan Diskominfo berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 ini merupakan Dinas baru, namun demikian secara operasional sebenarnya urusan pemerintahan yang terkait dengan komunikasi dan informatika sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan nama dan level kelembagaan yang berbeda. Sebelum terbentuknya Diskominfo tahun 2011 ini, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh 2 (dua) unit kelembagaan, yaitu Bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE) pada Sekretariat Daerah (Eselon III-A), dan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika dan pariwisata Budaya (Dishubkominfoarbud). Sejalan dengan restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tersebut, maka kedua lembaga tersebut kemudian 'dimerger' menjadi satu dan berubah nama menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga Dishubkominfoarbud, berubah menjadi Dishubparbud saja, dan kelembagaan Bagian PDE pada Setda ditiadakan.

Perubahan terkait kelembagaan yang mengelola urusan komunikasi dan informatika di Kota Pekalongan mengalami beberapa dinamika. Sebelum tahun 2008 sendiri, penyelenggaraan urusan Kominfo, terutama yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ditangani oleh Bidang Data Elektronik yang berada atau menjadi satu dengan Badan Arsip, Data Elektronik dan Perpustakaan Daerah (Bardepusda). Ketika dilakukan restrukturisasi kelembagaan pada tahun 2008, maka urusan Arsip dan perpustakaan berdiri sendiri menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan Bidang Data Elektronik dipisahkan menjadi Bagian PDE pada Setda, dan pada saat yang sama dibentuk Bidang Kominfo di Dishubkominfoarbud. Dan pada periode sebelumnya, pengelolaan TIK ditangani oleh sebuah lembaga tersendiri dalam bentuk Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE).

Dengan demikian, secara bertahap kelembagaan yang menangani urusan komunikasi dan informatika di Kota Pekalongan mengalami dinamika dari waktu ke waktu, dan terakhir menjadi Dinas yang berdiri sendiri, dengan level eselon II yang notabene merupakan level eselon yang tertinggi bagi organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota. Sekalipun sudah ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 pada awal tahun 2011, namun secara operasional



kelembagaan Diskominfo baru secara resmi dijalankan pada bulan September 2011 yang ditandai dengan pelantikan pejabat di Diskominfo.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Tugas, pokok dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berdasarkan PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 71 TAHUN 2021, TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA terdiri dari :

a. Kepala Dinas

1. Sekretariat

- Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik

3. Bidang Infrastruktur dan Statistik

- Seksi Statistik

4. Bidang Aplikasi dan Persandian

- Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

5. UPTD

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan beserta seksi-seksinya adalah sebagai berikut :

A. Tugas

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang Komunikasi, informatika,



statistik dan persandian sesuai dengan kebijakan Walikota.

Pelaksanaan kewenangan tersebut berdasarkan Peraturan Walikota No. 71 tahun 2016 tentang TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang komunikasi dan informatika;
2. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
3. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik;
4. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang infrastruktur dan statistik;
5. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang aplikasi dan persandian;
6. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
7. penyelenggaraan Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi/ Government Chief Information Officer (GCIO) Daerah;
8. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
9. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

1.3. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah No. 68 tahun 2016, tanggal 1 Desember 2016 Tentang Kedudukan dan susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas dan



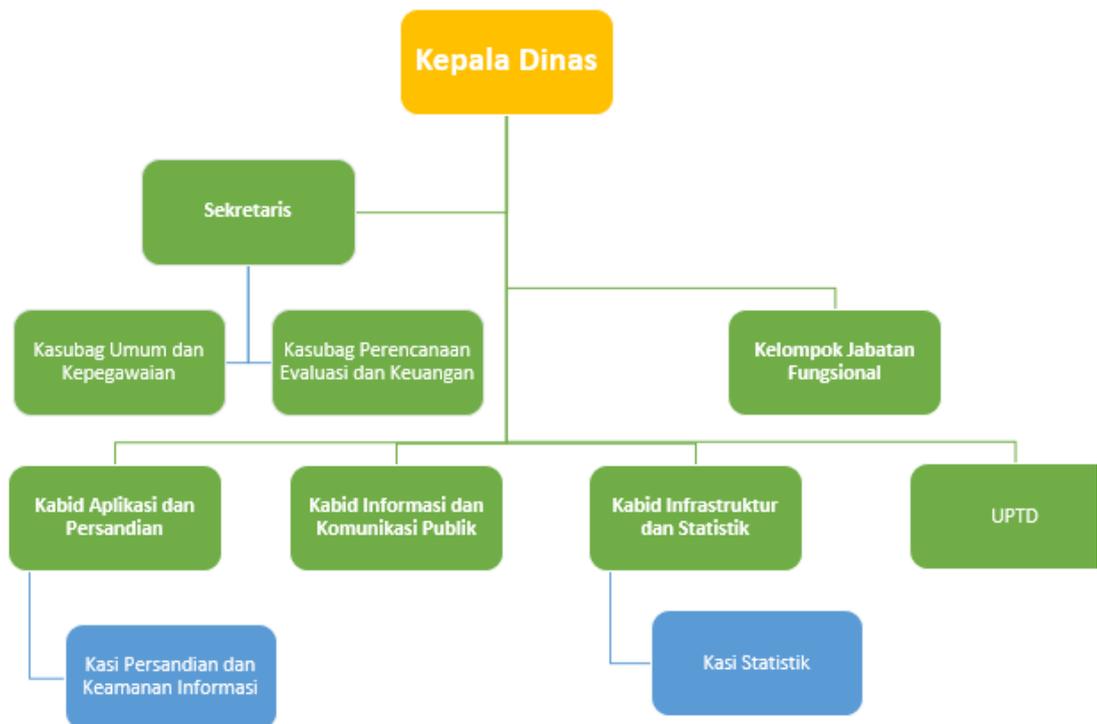
diperbarui dengan Peraturan Walikota Nomor 71 tahun 2021 tentang TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik
4. Bidang Infrastruktur dan Statistik
 - Seksi Statistik
5. Bidang Aplikasi dan Persandian
 - Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
PEKALONGAN
NOMOR 71 TAHUN 2021,
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEKALONGAN**





1.4. Isu Strategis Yang Dihadapi SKPD

Untuk mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi, diperlukan adanya analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi, situasi dan kondisi. Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam merumuskan lingkungan strategis, Dinkominfo menggunakan metode atau teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman:

1. Kekuatan (Strengths)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Dinkominfo dalam mencapai visi dan misi, adalah :

- a. Adanya perubahan bentuk organisasi dari Kantor menjadi Dinas Tipe B.
- b. Budaya inovasi terhadap ragam layanan publik yang cukup kuat.
- c. Kenaikan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan Modal operasional, seperti: peralatan untuk pengelolaan SPBE, Infrastruktur dan Publikasi

2. Kelemahan (Weaknesses)

Beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas Dinkominfo dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan analisis adalah :

- a. Terbatasnya SDM secara kualitatif dan kuantitatif
- b. Terbatasnya perlengkapan untuk menjalankan tugas
- c. Terbatasnya ruang di gedung dinkominfo.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai visi dan misinya, antara lain :

- a. Berkembangnya teknologi dari sisi infrastruktur dan aplikasi sehingga semakin banyak membuka peluang kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat.



- b. Adanya peluang dukungan dan kerjasama penerapan SPBE dari lembaga/organisasi lain.
 - c. Adanya dukungan dari dinas dan instansi pemerintah lainnya.
4. Ancaman (Threats)

Ancaman terhadap berlangsungnya kegiatan Dinkominfo dapat diperoleh dari beberapa hal antara lain :

- a. Rendahnya respon OPD dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika
- b. Kurangnya kurangnya sisi keamanan sistem dan infrastruktur;
- c. Kurangnya manajemen pengelolaan aset TIK.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.
- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2022 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2022. Pada bab ini rencana strategis Tahun 2021-2026 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
- BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)
DINKOMINFO KOTA PEKALONGAN TH. 2022

Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan kerangka yang memberikan petunjuk dan arah bagi pelaksanaan pembangunan dalam implementasi program-program pembangunan daerah yang diprioritaskan dan mendesak. Rencana strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan adanya rencana strategis, maka Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan *stakeholder*.

Kebijakan pembangunan daerah merupakan bagian terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, khususnya arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan dalam jangka waktu lima tahun yang merupakan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih periode 2021-2026 yang akan diwujudkan dengan **Visi :**

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius.”

Untuk Merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat Kota Pekalongan harus memahami akan makna penjabaran visi tersebut yaitu:

PEKALONGAN	:	Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km.
-------------------	---	--



		<p>Kota Pekalongan adalah kota yang meletakkan sejarah kehidupannya pada dua industri utama, yaitu Batik dan Perikanan. Industri Batik sudah menjadi urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan. Rantai nilainya meliputi proses produksi yang dimulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan barang jadi dan siap jual, proses penjualan dengan karakteristik hubungan pemasaran yang khas antara pengusaha dan pedagang, dan juga proses permodalannya. Di tiap-tiap rantai nilai tersebut banyak sekali menyerap tenaga kerja dengan pola hubungan informal. Kehidupan masyarakat Kota Pekalongan yang sangat lekat dengan kerajinan batik</p>
SEJAHTERA	:	<p>Kota Sejahtera adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan.</p>
MANDIRI	:	<p>mandiri adalah pembangunan yang dilaksanakan akan menciptakan masyarakat yang tidak menggantungkan nasib dan kondisi kehidupannya pada bantuan dari pihak lain, termasuk bergantung pada pemerintah dalam menentukan masa depannya. Pembangunan yang</p>



	<p>dilaksanakan akan membentuk pola pikir dan perilaku yang mampu menghadapi permasalahan dan tantangan, dengan menempatkan kemampuan yang dimiliki sebagai prioritas pertama dalam menyelesaikan permasalahannya. Nilai-nilai positif dalam kehidupan sosial seperti saling tolong menolong, gotong royong, empati, dan kebersamaan hidup akan terus ditumbuh kembangkan. Sehingga individu masyarakat tidak memandang dirinya sebagai pribadi semata, tetapi lebih menempatkan dirinya sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam konteks ini, falsafah “brayan urip” menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan.</p>
BERBUDAYA	<p>: Berbudaya memiliki arti memiliki budaya atau mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Budaya juga didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat: 1979). Dalam konsep pengertian seperti ini, maka tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide, dan kreativitas, baik dalam hidup maupun kehidupannya.</p>



BERBASIS NILAI NILAI RELIGIUSITAS	:	Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan menyadari sepenuhnya bahwa hidup dan kehidupan yang dijalani tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berbudaya, senantiasa dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dari setiap individu masyarakat sesuai dengan agama yang dipeluknya. Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada umatnya untuk melaksanakan kegiatan peribadatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar agama, melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dari generasi ke generasi
--	---	---

yang mana dijabarkan kedalam Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan teknologi informasi berbasis komunitas;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah.

Atas dasar arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan yang diwujudkan dalam bentuk visi dan misi menjadi dasar acuan dan landasan operasional bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menentukan strategi dan kebijakan pembangunan untuk menyusun prioritas program dan kegiatan periode 5 (lima)



tahun mendatang dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026.

Dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 telah menyuratkan bahwa penyelenggaraan komunikasi, informatika, statistik dan persandian merupakan unsur dari pendukung dan penunjang bagi misi RPJMD. Urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian tersurat dalam misi ketujuh.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan Periode 2021-2026

VISI :				
Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius				
Misi 7 :Bidang Informasi, Persandian dan statistik				
<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government 				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	➤ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	➤ Optimalnya Implementasi SPBE	Peningkatan ketersediaan sarpras, pengembangan	Peningkatan infrastruktur, kualitas SDM dan sistem inovasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif
2	➤ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	➤ Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral	Peningkatan ketersediaan sarpras, pengembangan	Peningkatan infrastruktur, kualitas SDM dan sistem inovasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif
3	➤ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	➤ Mewujudkan keamanan informasi daerah	Peningkatan ketersediaan sarpras, pengembangan	Peningkatan infrastruktur, kualitas SDM dan sistem inovasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif

Misi 7 :Bidang Komunikasi Publik				
<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government 				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan



1.	Meningkatnya kualitas layanan publik (smart governance)	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Peningkatan sistem pelayanan publik & Penguatan pengelolaan infokom di Perangkat Daerah yang ada di Kota Pekalongan	Peningkatan infrastruktur, <i>kualitas SDM</i> dan sistem inovasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif
----	---	---	---	--

Tabel 2.2

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi publik	Persentase Pelayanan Informasi Publik	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	70	80	90	100	100
2.	Indeks domain tata kelola SPBE	Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	Persentase layanan SPBE (Layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	2.85	2.95	3.05	3.15	3.16
		Tingkat kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	58.79	60.61	62.42	64.24	66.06



3.	Tingkat kematangan layanan data terbuka	Prosentase Perangkat Daerah yang menyediakan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	I	I	I	II	II
4.	Indeks Keamanan Informasi		Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	3,06	3,20	3,33	3,46	3,60
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik	I	I	I	II	II
			Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan					

2.2. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, IKU dan APBD. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja di awal tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (smart governance)	indeks SPBE	2.85 Indeks
2	meningkatnya kualitas layanan publik (smart governance)	nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	95.00 skor
3	program aplikasi informatika	indeks aspek teknologi informatika dan komunikasi	2.9 indeks
4	program penyelenggaraan statistik sektoral	presentase perangkat daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100 persen
5	program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	presentasi sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	1.87 persen
6	program informasi dan komunikasi publik	presentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 persen
7	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen

Jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 13.685.578.000,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara terperinci, realisasi anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.4
Rencana Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Belanja Operasi	12.205.460.000,-	11.390.729.299,-	93,32%
2	Belanja Modal	1.480.118.000,-	1.465.663.811,-	99,02 %
Jumlah		13.685.578.000,-	12.856.393.110,-	93,94 %

Belanja Operasi memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan Belanja Modal karena Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.



Dalam upaya mencapai target-target per triwulan dari masing-masing sasaran strategis, ditetapkan rencana aksi dalam masing-masing program dan kegiatan beserta alokasi anggarannya sebagai berikut:

Tabel 2.5
FORMULIR RENCANA AKSI
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

Perangkat Daerah/Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun : 2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Tahun	Triwulan				Tahun	Triwulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	indeks	2.85		PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
						Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
						Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen panduan manajemen spbe yang disusun	dokumen		



No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Tahun	Triwulan				Tahun	Triwulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	skor	95		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
3	Program Aplikasi Informatika	Indeks aspek teknologi Informatika dan komunikasi	indeks	2.9		PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
						Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah dokumen domain SPBE yang disusun	dokumen	2	
						Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	jumlah bulan pemeliharaan peralatan DC dan DRC	bulan	12	
							jumlah capacity building teknik pelayanan jaringan yang diselenggarakan	kali	3	
							jumlah partisi ruang DC/DRC yang dibangun	partisi	1	



No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Tahun	Triwulan				Tahun	Triwulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah sosialisasi pengembangan aplikasi yang dilaksanakan	kali	3	
						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah aplikasi smartcity yang dibeli	aplikasi	1	
							jumlah aplikasi smartcity yang disewa	aplikasi	1	
							jumlah fasilitasi kegiatan yang mendukung komunitas TIK	kali	28	
						Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah pelatihan TIK bagi ASN dan Masyarakat yang dilaksanakan	kali	8	
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	jumlah monev ekosistem SPBE yang dilaksanakan	kali	3	
						Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
						Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah bulan dalam layanan pengembangan dan operasionalisasi domain dan subdomain pemerintah kota pekalongan	bulan	12	



No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Tahun	Triwulan				Tahun	Triwulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah bulan pemeliharaan jaringan batik.net	bulan	12	
							jumlah kapasitas bandwidth internet untuk layanan batik.net	Mbps	1260	
							jumlah titik jaringan berbasis fiber optic yang dibangun	titik	3	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase perangkat daerah yang menyediakan data statistik sektoral	persen	100		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
						Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah aplikasi satu data yang dikembangkan	aplikasi	1	
							Jumlah dokumen database indikator TIK yang disusun	dokumen	1	
							Jumlah dokumen data SDTD yang disusun	dokumen	1	



No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Tahun	Triwulan				Tahun	Triwulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	presentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	persen	1,87		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
						Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
						Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi yang disusun	dokumen	2	
						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah lisensi Endpoint Security (Antivirus) yang dibeli	lisensi	25	
							Jumlah lisensi Sertifikat Elektronik TLS *.pekalongankota.go.id yang dibeli	lisensi	1	
							Jumlah penilaian mandiri Indeks Keamanan Informasi yang dibeli	kali	1	



No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Tahun	Triwulan				Tahun	Triwulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah sosialisasi Keamanan Informasi yang dilaksanakan	kali	1	
						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	audit TIK yang dilaksanakan	kegiatan	2	
							jumlah pelatihan teknis keamanan informasi dan teknologi informasi yang dilaksanakan	kegiatan	1	
						Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				
						Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah dinas yang dikirim / diterima	dokumen	74	
							jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk jaring komunikasi sandi Internal pemerintah daerah yang diadakan	unit	2	
							jumlah prosedur persandian yang disusun	dokumen	2	



No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Tahun	Triwulan				Tahun	Triwulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian yang disusun	dokumen	1	
6	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase penyelesaian permohonan informasi publik	persen	100		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
						Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
						pengelolaan konten dan perencanaan media	jumlah bulan pengelolaan konten website pekalongankota.go.id	bulan	12	
						pengelolaan media komunikasi publik	jumlah jam siaran RKB	jam	18	
							jumlah jam siaran Batik TV	jam	10	
						pelayanan informasi publik	jumlah layanan internet keliling yang diselenggarakan	kali	40	
							jumlah penyelenggaraan pameran KIP	kali	1	
							jumlah siaran keliling mobil M-Pustaka yang dilaksanakan	kali	30	
						layanan hubungan media	jumlah advertorial yang dimuat di media massa dalam setahun	kali	3	
							jumlah liputan press conference yang diselenggarakan	kali	4	



No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Tahun	Triwulan				Tahun	Triwulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						manajemen komunikasi krisis	jumlah aplikasi call center yang disewa	aplikasi	3	
							jumlah bulan pengelolaan pengaduan masyarakat	bulan	12	
							jumlah FGD yang diselenggarakan	kali	3	
						kemitraan dengan pemangku kepentingan	jumlah kegiatan pendampingan FK metra yang dilakukan	kali	4	
							jumlah kegiatan pendampingan KIM yang dilaksanakan	kali	4	
						penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	jumlah press conference yang diadakan	kali	12	
							jumlah press release yang diadakan	kali	12	
							jumlah press room yang diadakan	kali	12	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	indeks	75		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		kali	1	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun	dokumen dokumen	2 1	



No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Tahun	Triwulan				Tahun	Triwulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun	dokumen	4	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan) Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP yang disusun	bulan dokumen dokumen dokumen	12 4 2 5	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	



No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Tahun	Triwulan				Tahun	Triwulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	dokumen	1	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik	kali	2	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah				
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda -Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pos	bulan unit	12 1	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	11	



No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Tahun	Triwulan				Tahun	Triwulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	orang/kali	20	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	12	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				



No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Tahun	Triwulan				Tahun	Triwulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	12	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	2	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	



2.3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan memiliki program dan kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dengan Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Dengan Kegiatan :

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- d. Pelayanan Informasi Publik
- e. Layanan Hubungan Media
- f. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
- g. Manajemen Komunikasi Krisis

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Dengan Kegiatan :

- a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Dengan Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI



Dengan Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis).

2.4. Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator kinerja Utama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per / 09 /M.PAN / 5 / 2017 , perlu dilakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2021-2016.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan ini merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif guna pencapaian sasaran , tujuan kegiatan Organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika yang sudah ditetapkan dapat memperjelas arah kemajuan pembangunan berkesinambungan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Penghitungan	Satuan	TARGET			Sumber Data
					2022	2023	2024	
1	Nilai Keterbukaan informasi publik tingkat Kota	- Nilai Keterbukaan informasi Publik(KIP) Tingkat Kota	<i>Nilai Evaluasi tata kelola KIP tahun N</i>	Indeks	95.00	96.00	97.00	<i>KIP Provinsi</i>
2	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks domain tatakelola SPBE	<i>Nilai Evaluasi tata kelola SPBE tahun N</i>	Indeks	2.85	2.95	3.05	<i>Menpan RB</i>
3	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik	- Indeks tata kelola KAMI	<i>Nilai Evaluasi tata kelola KAMI tahun N</i>	Indeks	I	II	II	BSSN
4	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral	- Persentase ketersediaan data statistik sektoral	<i>Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun N</i>	Indeks	68	70	73	Dinkominfo
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	<i>Nilai Evaluasi AKIP OPD tahun N</i>	Indeks	86.00	87.00	88.00	Inspektorat



2.5. Rencana Kinerja Tahunan 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bentuk komitmen kinerja yang akan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja selama tahun anggaran tersebut.

Sasaran yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan dinyatakan dalam Penetapan Sasaran Kinerja 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Rencana Kinerja th. 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	2.85 Indeks
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	95.00 Skor
3	Program Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informatika dan Komunikasi	2,9 Indeks
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100 Persen
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	1,87 Persen



6	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi public	100 Persen
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021 - 2026 maupun RKPD Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama RPJMD 2021 – 2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah) Tahun 2021-2026.

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah

Presentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil



50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus perhitungan :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Berhasil : 95

Berhasil : 82.5

Cukup Berhasil : 70

Tidak Berhasil : 57.5

Sangat Tidak Berhasil : 25

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing – masing kelompok indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perubahan ketiga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 maupun Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan



pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2022 dan indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam revisi ketiga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2021 - 2026.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan sebagai target pencapaian indikator sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam revisi ketiga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 12 (Dua belas) indikator kinerja, dengan rincian :

1. Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator
2. Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
3. Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
4. Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator
5. Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator

Capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Target Capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Pekalongan Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran (IKU OPD)	Satuan	Target Tahun 2022
Optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	indeks	2,85



Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	skor	95,00
Program Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informatika dan Komunikasi	indeks	2,9
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	persen	100
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	persen	1,87
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	persen	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Revisi Kedua Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 disajikan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Pekalongan



No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Penjelasan		
				Alasan Formulasi	Rumus Perhitungan	Sumber data
1	Optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	indeks	Untuk mengetahui tingkat kematangan pengelolaan SPBE	<i>Nilai Evaluasi tata kelola SPBE tahun N</i>	Menpan RB
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	skor	Salah satu parameter pengelolaan Informasi Publik	<i>Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun N</i>	KIP Provinsi
3	Program Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informatika dan Komunikasi	indeks	Salah satu parameter pengelolaan keamanan informasi	<i>Nilai Evaluasi tata kelola KAMI tahun N</i>	BSSN
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	persen	Salah satu parameter dalam pengelolaan data statistik dalam rangka satu data Indonesia	Presentasi Perangkat daerah yang menyediakan data Tahun N	Dinkominfo
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan	Persentase sistem elektronik	persen	Salah satu parameter pengelolaan SPBE	Presentasi sistem elektronik yang telah	Dinkominfo



	Informasi	yang telah dilakukan pengujian ketentraman			dilakukan pengujian ketentraman tahun N	
6	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	persen	Salah satu parameter pengukuran kualitas tata kelola Informasi Publik	<i>Nilai Evaluasi tata kelola KIP tahun N</i>	KIP provinsi
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	Salah satu parameter keterukuran akuntabilitas badan publik dengan nilai SAKIP	<i>Nilai Evaluasi AKIP OPD tahun N</i>	Inspektora t

3.3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap perangkat daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definif, terukur dan terealisasi. IKU yang ditetapkan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud.



IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan telah menetapkan 2 (Dua) indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026.

Adapun capaian kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dijelaskan melalui 6 (enam) langkah analisis sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi kinerja tahun 2022 dapat disajikan dalam Tabel 3.5 sebagai berikut

Tabel 3.5

Perbandingan antara Target dan Realisasi kinerja tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi tahun 2022	capaian	Kategori
1	Optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	indeks	2,85	3,02	106%	sangat berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	skor	95,00	90,01	95%	sangat berhasil

Berdasarkan analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan adalah sebagai berikut sebagai berikut :

a. Indikator Indeks SPBE target yang ditetapkan dengan satuan indeks 2,85

Capaian kinerja indikator indeks SPBE yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan sebesar 3,02 sehingga prosentase capaiannya sebesar 106% atau mendapat pengukuran kinerja sangat berhasil terhadap target dan realisasi Tahun 2022.

b. Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) target sebesar 95,00

Capaian kinerja indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)



teralisasi sebesar 90,01 poin sehingga prosentase capaiannya sebesar 95% atau mendapat pengukuran kinerja sangat berhasil terhadap target dan realisasi Tahun 2022.

2. Membandingkan antara Target dan Realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

dapat disajikan dalam Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2022 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator sasaran	Satuan	kondisi awal 2021	realisasi			Target			capaian (%)		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Indeks SPBE	indeks	2,82	3,24	2,82	3.02	3,14	2.75	2.85	103%	102%	106%
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	skor	N/A	91,00	N/A	90.01	91,00	93.00	95.00	100%	100%	105%

Berdasarkan analisis Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2022 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir disimpulkan bahwa capaian kinerja utama dinkominfo Kota Pekalongan adalah sebagai berikut sebagai berikut :

a. Indikator Indeks SPBE target yang ditetapkan dengan satuan indeks 2,85

Capaian kinerja Indeks SPBE terealisasi sebesar 3.02 sedangkan prosentase capaiannya sebesar 106% atau dalam pengukuran kinerja



mengalami “kenaikan” apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

b. Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) target sebesar 95,00

Capaian kinerja indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terealisasi sebesar 90,01 atau mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

selanjutnya adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebagai berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

No	Indikator sasaran	satuan	kondisi awal tahun 2021	realisasi					target akhir renstra th 2022	capaian %	kategori
				2018	2019	2020	2021	2022			
1	Indeks SPBE	indeks	2,82	2,95	3,14	3,14	2,82	3.02	2.85	105%	baik
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	skor	N/A	86,2	92,08	91,00	N/A	90.01	95.00	94,74%	informatif

Berdasarkan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi disimpulkan bahwa capaian kinerja utama Dinas



Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan adalah sebagai berikut sebagai berikut :

a. Indikator Indeks SPBE target yang ditetapkan dengan satuan indeks 2,85

Capaian Indeks SPBE sebesar 3,02 sehingga prosentase capaiannya 105% atau mendapat pengukuran kinerja “Baik” apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

b. Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) target sebesar 95,00

Capaian kinerja indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terealisasi sebesar 90,01 sehingga prosentase capaiannya sebesar 94,74% atau mendapat pengukuran kinerja “Informatif” apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi tahun 2022	capaian %	Kategori	analisis keberhasilan/kegagalan	solusi yang dilakukan



1	Optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	indeks	2,85	3,02	106%	sangat berhasil	faktor : terdapat efektivitas dalam pencapaian target indikator	solusi : Adanya koordinasi antar OPD Aktivasi Admin dalam pengelolaan data OPD berjalan lancar
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	skor	95,00	90,01	95%	sangat berhasil	terdapat efektivitas dalam pencapaian target indikator	solusi : Dukungan Komitmen Walikota dalam kelangsungan pelaksanaan KIP di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program yang menunjang pencapaian kinerja kami sajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 3.9

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		sisa anggaran
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.657.305.000	4.477.308.501	96,14	179.996.499



No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		sisanggaran
			Rp	%	Rp
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.750.000	35.588.000	99,55	162.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.750.000	10.748.000	99,98	2.000
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.495.000	99,67	5.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.500.000	23.345.000	99,34	155.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.062.957.000	2.926.083.498	95,53	136.873.502
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.026.607.000	2.889.733.498	95,48	136.873.502
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.850.000	34.850.000	100	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	100	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.167.000	55.167.000	100	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000	100	0
	sosialisasi peraturan perundang-undangan	50.167.000	50.167.000	100	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	504.540.000	504.435.200	99,98	104.800
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	100	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215.600.000	215.505.700	99,96	94.300



No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		sis anggaran
			Rp	%	Rp
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.000.000	109.989.500	99,99	10.500
	Penyediaan Barang Cetakann dan Penggandaan	40.000.000	40.000.000	100	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	13.940.000	13.940.000	100	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000	120.000.000	100	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	585.791.000	544.868.694	93,01	40.922.306
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	100	0
	Penyediaan Jsa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	480.691.000	440.144.503	91,56	40.546.497
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.700.000	102.324.191	99,63	375.809
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	413.100.000	411.156.109	99,53	1.933.891
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	212.295.000	210.361.109	99,09	1,933.891
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.155.000	94.155.000	100	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.650.000	106.650.000	100	0
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.253.218.000	4.861.790.488	92,55	391.427.512
	pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	5.253.218.000	4.861.790.488	92,55	391.427.512



No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		sisanggaran
			Rp	%	Rp
	kabupaten/kota				
	pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	161.020.000	160.487.240	99,66	532.760
	pengelolaan media komunikasi publik	3.457.020.000	3.118.364.075	90,20	338.655.925
	pelayanan informasi publik	349.950.000	3.43.917.074	98,28	6.032.926
	layanan hubungan media	955.678.000	945.467.829	98,93	10.210.171
	kemitraan dengan pemangku kepentingan	33.300.000	32.950.000	98,95	350.000
	manajemen komunikasi krisis	274.250.000	233.429.670	85,12	40.820.330
	penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	22.000.000	21.974.600	99,88	25.400
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.522.305.000	3.283.377.464	93,22	238.927.536
	pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	2.271.530.000	2.196.069.624	96,68	75.460.376
	penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	9.000.000	8.874.318	98,60	125.682
	penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	2.262.530.000	2.187.195.306	96,67	75.334.694



No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		sisanggaran
			Rp	%	Rp
	pengelolaan e-goverment di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	1.250.775.000	1.087.307.840	86,93	163.467.160
	sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	333.000.000	291.949.010	87,67	41.050.990
	pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	202.350.000	201.640.660	99,65	709.340
	pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	370.925.000	316.603.264	85,36	54.321.736
	pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas	275.500.000	230.124.906	83,53	45.375.094
	pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	39.000.000	30.515.000	78,24	8.485.000
	monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	30.000.000	16.475.000	54,92	13.525.000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	108.750.000	104.395.937	96,00	4.354.063
	penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	108.750.000	104.395.937	96,00	4.354.063
	koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	108.750.000	104.395.937	96,00	4.354.063
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	144.000.000	129.520.720	89,94	14.479.280
	penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	116.000.000	103.457.620	89,19	12.542.380



No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		sis anggaran
			Rp	%	Rp
	kabupaten/kota				
	penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	15.000.000	12.180.500	81,20	2.819.500
	pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	30.000.000	27.286.400	90,95	2.713.600
	penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	71.000.000	63.990.720	90,13	7.009.280
	penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota	28.000.000	26.063.100	93,08	1.936.900
	operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	28.000.000	26.063.100	93,08	1.936.900
	Jumlah	13.685.578.000	12.856.393.110	93,94	829.184.890

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk menunjang pencapaian kinerja ini pada Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pekalongan adalah:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran 36 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2022 Rp.4.657.305.000,00 dan realisasi Rp. 4.477.308.501,00 atau sebesar 93,94%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 829.184.890,00 atau 6,06%.
- 2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan anggaran Rp.5.253.218.000,00,- dan realisasi Rp.4.861.790.488,00,- atau sebesar 92,55%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.391.427.512,00 atau 7,45%.
- 3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan anggaran



Rp.3.522.305.000,00,- dan realisasi Rp.3.283.377.464,00,- atau sebesar 93,22%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.238.927.536,00 atau 6,78%.

- 4) Program Penyelenggaraan statistik sektoral dengan anggaran Rp.108.750.000,00,- dan realisasi Rp.104.395.937,00,- atau sebesar 96%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.4.354.063,00 atau 4%.
- 5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran Rp 144.000.000,00,- dan realisasi Rp.129.520.720,00,- atau sebesar 89,94%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.14.479.280,00 atau 10,06%.

6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target kinerja utama terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) sub kegiatan.
- 2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan.
- 3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan.
- 4) Program Penyelenggaraan statistik sektoral terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan
- 5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan



Negara.

Pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut di atas. pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dengan total nilai Pagu keseluruhan adalah sebesar **Rp. 13.685.578.000,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 12.856.393.110,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **93,94%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 dengan kondisi efisiensi anggaran adalah **Rp. 829.184.890,-** Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran / efisiensi.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
Tahun 2022

URAIAN	APBD	REALISASI	SISA ANGGARAN	(%)
Belanja Daerah	13.685.578.000	12.856.393.110	829.184.890	6,05%
1. Belanja Operasi	12.205.460.000	12.205.460.000	814.730.701	6,67%
- Belanja Pegawai	3.128.082.000	2.981.533.498	146.548.502	4,86%
- Belanja Barang dan Jasa	9.077.378.000	8.409.195.801	668.182.199	7,36%
2. Belanja Modal	1.480.118.000	1.465.663.811	14.454.189	0,97%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.341.138.000	1.330.616.705	10.521.295	0,78%
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.700.000	25.697.200	2.800	0,01%
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	113.280.000	109.349.906	3.930.094	3,46%
BELANJA	13.685.578.000	12.856.393.110	829.184.890	6,05%



Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Pencapaian Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
Berdasarkan Program Tahun 2022

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.657.305.000	4.477.308.501	96,14
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.253.218.000	4.861.790.488	92,55
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.522.305.000	3.283.377.464	93,22
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	108.750.000	104.395.937	96,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	144.000.000	129.520.720	89,94
Jumlah		13.685.578.000	12.856.393.110	93,94



Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan pada tahun 2022.

3.5. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel .3.12
Capaian Prestasi yang diraih Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2022

No.	Prestasi/Penghargaan	Tahun
1	Peringkat 3 Lembaga Penyiaran Terbaik se-jateng oleh KPID Jateng	2022
2	Berita Teraktif di Layanan Informasi Publik oleh Antara Digital Media	2022
3	PPID Informatif oleh Komisi Informasi Jateng	2022
4	Peringkat 1 tingkat OPD dan/atau peringkat 5 tingkat OPD dan kelurahan pada survei kepuasan masyarakat (SKM) oleh Bagian Organisasi.	2022



BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung serta melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2022 adalah baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IK yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa Dinkominfo Kota Pekalongan telah berupaya memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas utamanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan penambahan beban kerjanya sebagai Dinas.

4.2. Peningkatan dan Perbaikan Kinerja

Untuk lebih meningkatkan kinerjanya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan ke depannya akan melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Peningkatan kemampuan kerja dari SDM yang dimiliki.
2. Peningkatan dukungan keuangan dan sarana prasarana untuk mencapai layanan perpustakaan dan pengelolaan arsip sesuai standardisasi.
3. Senantiasa memantau dan mengolah informasi yang diperoleh dari tren/kebutuhan masyarakat terkini dan dari hasil studi ke PD sejenis.
4. Melakukan inovasi-inovasi sesuai tren dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

4.3. Penutup

Demikian laporan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan sebagai realisasi rencana kerja tahun 2022.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para Bidang, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf dan tenaga kegiatan lainnya yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang



tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan secara optimal dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok secara keseluruhan telah sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan diatas.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota pekalongan dimasa yang akan datang, juga diharapkan dapat berperan serta sebagai barometer dalam penilaian kualitas kinerja juga sebagai alat pendorong untuk terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean and good government), serta dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk penyusunan perencanaan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

Pekalongan, 28 Februari 2023

**KEPALA DINAS KOMINFO
KOTA PEKALONGAN**



ARIS KARYADI, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19711017 199903 1 007